

Daftar Isi Klipping Media Massa Tanggal 24 September 2020

Sumber Pengambilan Dokumen

A	Provinsi Jawa Barat	
	APBD Perubahan 2020 Jawa Barat, Pangkas Program Tak Mendesak	<i>Galemdia/ Hal. 2</i>

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: APBD Perubahan 2020 Jawa Barat, Pangkas Program Tak Mendesak
Entitas / Cakupan	: Provinsi Jawa Barat
Sumber / Hal	: Galemdia/ Hal. 2
Edisi	: Kamis, 24 September 2020

APBD Perubahan 2020 Jawa Barat, Pangkas Program Tak Mendesak

DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memangkas alokasi anggaran di setiap sektor yang dianggap tidak mendesak dilaksanakan dan mengalihkannya ke pos anggaran yang membutuhkan penanganan segera.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Taufik Hidayat di sela-sela Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Gubernur Perihal Raperda Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 di Ruang Sidang DPRD Provinsi Jawa Barat, Selasa (22/9).

Sehari sebelumnya, Senin (21/9) malam, DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Jabar Tahun Anggaran (TA) 2020.



Taufik mengatakan, DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berjuang keras melakukan penyesuaian anggaran demi memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

"Saat ini kami sedang dalam titik krusial, yang mana harus memastikan pos anggaran yang semakin menipis ini benar-benar dimaksimalkan untuk kebutuhan anggaran yang tepat sasaran," kata Taufik.

Ia mengakui, kebijakan perubahan anggaran publik (APBD) Jabar 2020 yang telah ditandatangani bersama gubernur, murni di luar estimasi sebelumnya. DPRD bersama Pemprov Jawa Barat, lanjutnya, telah membahas dan menetapkan APBD Tahun Anggaran (TA) 2020.

Namun pada perkembangannya, terdapat beberapa hal yang

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat



RAPAT Paripurna DPRD Provinsi Jabar dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jabar terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2020, Senin (21/9) malam.

memerlukan penyesuaian baik dari sisi kebijakan maupun sisi substansi. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan yang diambil pemerintah berupa refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Taufik menuturkan, sendi kehidupan masyarakat yang terimbas pandemi Covid-19 sangat luas. Karenanya pemerintah berusaha untuk memprioritaskan sektor-sektor

yang membutuhkan penanganan segera. "DPRD dan Pemerintah Provinsi Jabar memandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap APBD TA 2020," cetus Ketua DPD Gerindra Jabar itu.

Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Gubernur Perihal Raperda Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 dilanjutkan dengan Rapat Komisi pada 23 September 2020

dan Rapat Fraksi pada 24 September 2020.

Pendidikan dan kesehatan

Sementara itu, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Jabar Tahun Anggaran (TA) 2020, Senin (21/9) malam, DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Pemprov Jawa Barat untuk memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan dalam APBD Perubahan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020. APBD Perubahan diharapkan dapat meng-cover kebutuhan dua sektor vital tersebut.

"Ada beberapa poin krusial yang menjadi konsen kami (DPRD) terhadap kebijakan anggaran perubahan. Poin-poin krusial tersebut menjadi catatan kami untuk dipertimbangkan oleh gubernur," kata Ketua DPTRD Provinsi Jawa Barat, Taufik Hidayat.

Taufik menuturkan, sendi kehidupan masyarakat yang terimbas

panceni Covid-19 sangat luas. Dampak pandemi Covid-19 sangat terasa pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Prioritas terhadap pendidikan dan kesehatan, lanjut Taufik yang juga Ketua DPD Gerindra Jabar itu, bukan tanpa alasan. Keduanya termasuk sektor yang paling vital dan membutuhkan perhatian serius.

"Tanpa bermaksud mengesampingkan urusan lainnya, perkara pendidikan dan kesehatan memang menjadi masalah paling mendesak, selain yang paling vital, juga harus ditangani sesegera mungkin. Hampir setiap menit banyak korban berjatuhan akibat virus ini, sementara pada waktu yang sama kegiatan pendidikan menemui banyak kendala yang berakibat pada macetnya proses belajar-mengajar baik di sekolah maupun yang lainnya," cetus Taufik.

Untuk itu, dia berharap supaya semua pihak dapat memahami situasi ini sehingga bersama-sama mencari jalan keluarnya. "Ini saatnya bagi kita semua, duduk bersama untuk mencari solusi atas persoalan ini," katanya.

(ati/"GM")**